



Title	: Masa Depan Pembangunan Infrastruktur Pasca Pandemi
Date	: 02 November 2021
Media	: Harian Ekonomi Neraca
Page	: Opinion
Author	: Mahpud Sujai

Masa Depan Pembangunan Infrastruktur Pasca Pandemi

*Oleh: Mahpud Sujai, Peneliti Madya Kemenkeu *) .*

Selasa, 02/11/2021

Pandemi Covid 19 memiliki dampak masif ke segala sektor kehidupan terutama perekonomian. Salah satu sektor perekonomian yang paling terdampak karena pandemi covid 19 adalah pembangunan infrastruktur. Sebelum terjadi pandemi, pemerintah Presiden Jokowi menggenjot habis-habisan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol, kereta api, LRT/MRT, Bandara, Pelabuhan hingga bendungan dan saluran irigasi. Hampir sebagian besar anggaran pembangunan dalam APBN mengalir ke sektor infrastruktur. Tidak hanya anggaran pemerintah, dana swasta dan investasi asing pun banyak yang mengalokasikan investasinya untuk pembangunan infrastruktur ini.

Pasca pandemi program dan kegiatan pemerintah lebih memprioritaskan kepada sektor Kesehatan dan penanganan pandemi covid 19. Program vaksinasi massal, tunjangan tenaga Kesehatan, penanganan pasien covid hingga bantuan sosial dan insentif perpajakan semua diarahkan untuk menangani pandemi covid 19. Pembangunan infrastruktur menjadi sedikit terhambat meskipun tetap berjalan dengan lebih lambat. Anggaran negara menjadi sangat terbebani karena harus menanggung beban ganda, yakni penanganan pandemi dan pembangunan megaproyek infrastruktur.

Penerimaan negara yang terkonstraksi akibat melemahnya aktivitas perekonomian selama masa pandemi menyebabkan pemerintah melonggarkan defisit fiskal hingga melebihi aturan yang ditetapkan yaitu diatas 3 persen dari PDB. Meningkatnya defisit fiskal ini tentu saja berimplikasi langsung pada peningkatan kebutuhan pembiayaan APBN yang Sebagian besar didanai dari utang. Peningkatan utang yang terjadi selama krisis pandemi ini tentu saja harus diwaspadai secara serius, sehingga pemerintah



sebaiknya lebih mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi program-program yang kurang berdampak maksimal terhadap pulihnya perekonomian.

Beberapa lembaga riset dan NGO sudah mulai meminta Pemerintah agar mengerem pembangunan infrastruktur yang tidak produktif. Akumulasi utang yang terus membesar serta tidak diimbangi dengan penerimaan pajak yang tinggi menjadi perhatian berbagai LSM. Beberapa LSM lain meminta pemerintah agar lebih meninjau kembali suntikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang dinilai belum sebanding dengan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara saat ini.

Tujuan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menggenjot pembangunan infrastruktur belum tercapai dengan baik karena terhambat datangnya krisis Pandemi. Pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menimbulkan *trickle down effect* dan menggenjot pertumbuhan sektor industri dan sektor perekonomian lagi belum tercapai maksimal. Termasuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN Karya yang diprediksi sudah mulai menghasilkan pendapatan pada 2 hingga 3 tahun setelah dimulai pembangunan ternyata meleset, sehingga menimbulkan kesulitan *cashflow* bagi beberapa BUMN. Belum lagi ada beberapa proyek pembangunan yang berpotensi mangkrak kalau dibiarkan, sehingga pada akhirnya akan Kembali membebani APBN.

Berbagai permasalahan yang terjadi tersebut mengakibatkan publik bertanya-tanya bagaimana nasib pembangunan infrastruktur pasca pandemi ini. Seperti diketahui, pandemi covid 19 saat ini sudah mulai mereda. Masyarakat yang terinfeksi virus covid 19 semakin sedikit, rumah sakit mulai bisa bernafas lega, antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksin terus bertambah, kegiatan perekonomian sudah mulai normal, aktivitas transportasi baik darat, laut maupun udara berangsur-angsur mulai hidup kembali. Kondisi ini tentu saja harus kita sambut baik dan merupakan momentum penting yang harus dimanfaatkan untuk bangkit dari krisis pasca pandemi.

Namun krisis pandemi yang terjadi selama 2 tahun ini tentu saja meninggalkan beban yang tidak sedikit terutama bagi APBN. Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB meningkat pesat selama pandemi, kapasitas dan ruang fiskal APBN menjadi menyempit, pendapatan negara terutama penerimaan negara belum pulih seratus persen hingga



ekonomi global yang masih lemah menyebabkan harga-harga komoditas masih belum Kembali ke posisi sebelum pandemi.

Berbagai hal tersebut menyebabkan pemerintah semakin selektif dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang diakibatkan karena anggaran yang semakin terbatas. Pemotongan alokasi anggaran dan penghematan anggaran diperkirakan akan menjadi prioritas pemerintah untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan dan ruang fiskal. Tentu saja salah satu yang akan terdampak dari penghematan pemerintah dalam tahun-tahun ke depan adalah anggaran pembangunan infrastruktur yang sebelum krisis pandemi memakan anggaran dengan porsi yang sangat besar.

Prioritas Utama dan Selektif

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sudah menyatakan bahwa skema percepatan dan efisiensi Proyek Strategis Nasional (PSN) akan selalu diperbaharui agar sesuai dengan kondisi pasca pandemi. Secara umum berbagai PSN tersebut bisa diselesaikan sesuai target karena sudah dalam tahap proses akhir. Namun beberapa PSN yang masih dalam tahap awal atau dalam tahap perencanaan kemungkinan besar akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. Kementerian PUPR sudah menyatakan bahwa Pemerintah akan semakin selektif dalam membangun proyek baru. Pemerintah akan selalu mengupayakan ada nilai tambah dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur, misalnya proyek bendungan yang dibangun sekaligus meningkatkan nilai tambah dengan menjadi pendukung proyek pembangkit listrik.

Pembangunan infrastruktur pasca pandemi tentu saja akan terus dilanjutkan dan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Namun tentu saja akan terdapat berbagai penyesuaian yang akan dilakukan. Pertama pemerintah akan lebih selektif dalam memilih dan mengeksekusi proyek-proyek infrastruktur baru. Pemerintah akan memilih proyek infrastruktur yang lebih penting, memiliki nilai tambah lebih dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan menopang pertumbuhan dunia usaha.



Kedua, pemerintah akan lebih menjaga kualitas belanja infrastruktur dengan menjaga agar anggaran tidak bocor ke aspek non-prioritas, apalagi yang tidak berdampak apapun terhadap pemulihan ekonomi nasional. Ketiga pemerintah akan lebih selektif memilih pembiayaan dan pendanaan infrastruktur dengan mendahulukan pembiayaan non utang dan penyertaan modal serta Kerjasama pemerintah dengan swasta (*Publik Private Partnerships*). Pemerintah akan lebih selektif menggunakan dana yang berasal dari pembiayaan utang termasuk mengelola portofolio utang melalui upaya konversi pinjaman untuk menekan beban biaya bunga atas pinjaman luar negeri.

Dengan berbagai kebijakan dan kehati-hatian pemerintah, diharapkan pembangunan infrastruktur pasca krisis pandemi ini akan terus berlanjut sesuai dengan nawacita program presiden Jokowi dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah, keberlanjutan pembangunan dan pemulihan ekonomi untuk memicu pertumbuhan dunia usaha demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. *) *Tulisan ini merupakan pendapat pribadi .*

<https://www.neraca.co.id/article/154202/masa-depan-pembangunan-infrastruktur-pasca-pandemi>